



LKJIP TAHUN 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Dinas Kelautan Dan Perikanan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG


MOCH SOFYAN CHOLID
Pembina Tk. 1
NIP. 196607291993031004

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Dinas Kelautan dan Perikanan mengampu sasaran strategis “Meningkatnya Produksi Perikanan”.

- Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan “Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan”
- Dengan formulasi perhitungan $(\text{Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun } N - \text{Produksi Perikanan (N-1)}) \div \text{Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun } N - 1) \times 100\%$.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (empat) Program, yakni Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 1%; sampai dengan akhir tahun 2024 terjadi penurunan produksi perikanan sebesar -9,28%. Capaian produksi perikanan Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan.
2. Perlunya pengembangan kelembagaan masyarakat nelayan dan pembudidaya untuk mencapai kemandirian.
3. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengatasi penurunan kualitas lingkungan dan perairan laut.
4. Perlunya sarpras untuk mengatasi penurunan mutu hasil tangkapan.
5. Perlunya optimalisasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Ikhtisar Eksekutif.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	5
BAB I Pendahuluan.....	6
1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi.....	7
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	8
1.3. Isu-Isu Strategis.....	9
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	9
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024.....	13
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	15
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	15
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	17
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	35
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	21
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	32
3.3. Efisiensi Anggaran	33
3.4. Inovasi	34
3.5. Lintas Sektor	35
BAB IV Penutup	38
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja.....	42
L A M P I R A N.....	43

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi..... 10

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana 11

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2023 12

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2022 13

Tabel II. 1 Sasaran Strategis DinlutkanREMBANG, 2023-2026..... 15

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan 16

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 17

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinlutkan Rembang Tahun 2024 19

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Ka Dinlutkan Rembang Tahun 2024..... 20

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 21

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024 21

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 22

Tabel III. 4 Pengukuran Capaian Indikator Sasaran..... 22

Tabel III. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 22

Tabel III. 6 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 25

Tabel III. 7 Kontribusi Sasaran Dinlutkan terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah 33

Tabel III. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024 33

Tabel III. 9 Inventarisasi Lintas Sektor Dinlutkan Rembang 37

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Cascading Kinerja7

Gambar I. 2 Struktur Organisasi8

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

- 1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
- 2. *Tugas Fungsi dan Peta Jabatan*
- 3. *Isu – Isu Strategis*
- 4. *Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran*
- 5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Penbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 6. Peraturan Bupati Rembang nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
- 7. Peraturan Bupati Rembang nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 8. Peraturan Bupati Rembang nomor 42 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2021 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
- 9. Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
- 10. Surat Edaran Sekda nomor 000.8/0063/2023, tanggal 9 Januari 2025 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan laporan Kinerja tahun 2024.

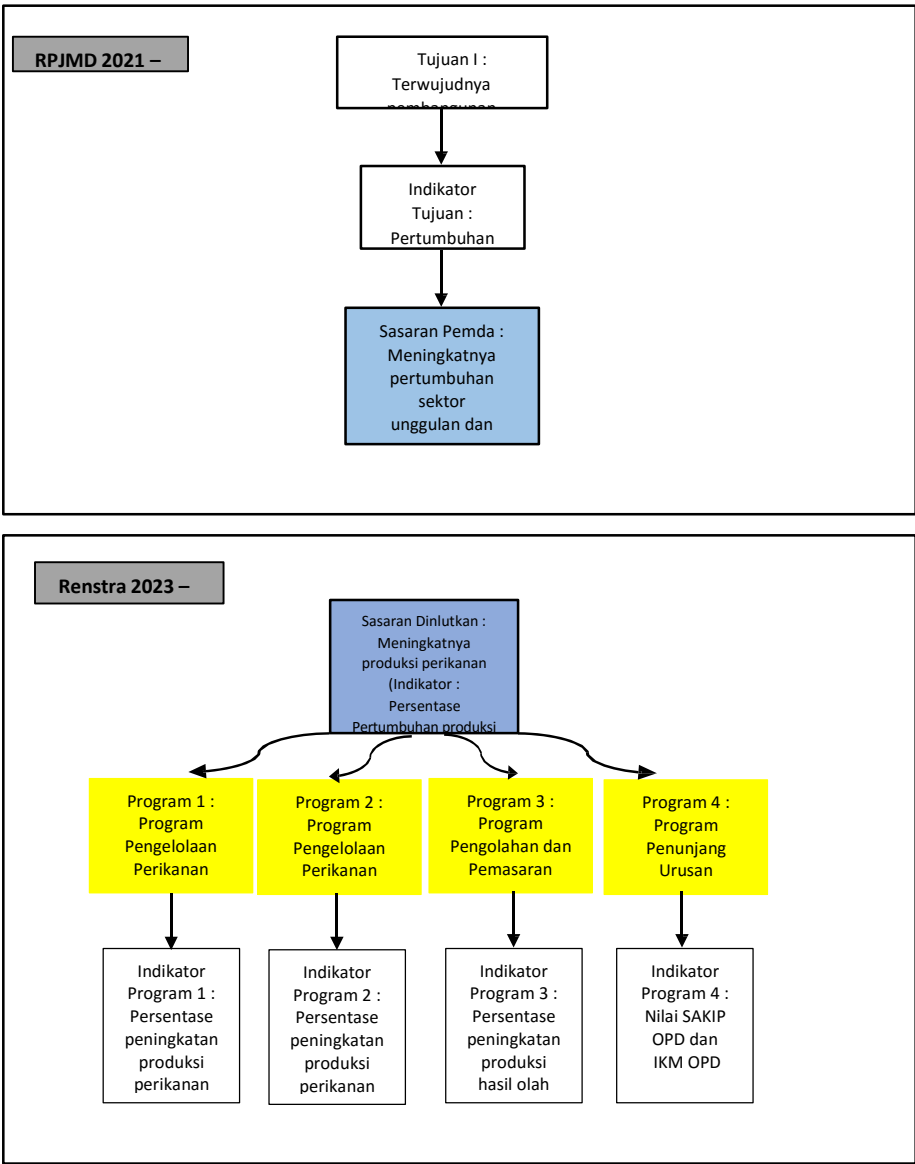
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. **Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment). dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 1
Cascading Kinerja



Sumber : RPJMD 2021-2026, Renstra Ditlutkan 2021-2016

Gambar I. 2
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam upaya mewujudkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dilaksanakan, dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

a. Permasalahan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan sesuai tugas dan Fungsi

Isu - isu strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis dokumen terkait sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang cenderung menurun akibat dampak Covid19;
2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun);
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan.

b. Gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menyelenggarakan fungsinya tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan dibagi menjadi 3 bidang teknis.

1. Bidang Kenelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Kenelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Dalam melaksanakan tugas pokoknya bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana budidaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan budidaya dan produksi garam serta sarana dan prasarana budidaya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		V			1		1			1	
B.	Jabatan Administrasi	18	2	6	0	0	10	4	4	0	2	6	2
	1. Administrator	4	2	2			4	2	2	0	0	3	1
	2. Pengawas	4		4			4	2	2	0	0	3	1
	3. Pelaksana	10				10	2				2		
C.	Jabatan Fungsional	51	V	V	V		26	0	16	1	9		
	Jumlah	70	4	12	0	10	37	4	21	1	11	7	2

Sumber: Data Kepegawaian Dinlutkan

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinlutkan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 25 orang (67,57%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 9 orang (24,32%), S2 sebanyak 2 orang (5,41%), D3 sebanyak 1 orang (2,7%). Komposisi pegawai pria lebih banyak dibanding pegawai wanita. Peawai pria sebanyak 25 orang sedangkan pegawai wanita sebanyak 12 orang. Jumlah kualifikasi pegawai.

Kebutuhan sesuai analisis jabatan dan beban kerja pegawai Karyawan Dinlutkan sebanyak 70 orang, dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 37 orang, sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 33 orang.

Tabel I. 2
Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Nilai Aset (Rp)*
01.01	Tanah	16	13.428.428.000,00
01.01.01	Tanah	16	13.428.428.000,00
01.02	Peralatan dan Mesin	461	6.895.515.773,00
01.02.01	Alat Besar	17	1.283.105.000,00
01.02.02	Alat Angkutan	72	2.530.282.338,00
01.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	11	168.628.250,00
01.02.04	Alat Pertanian	9	106.578.175,00
01.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	204	1.682.566.652,00
01.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	35	170.573.632,00
01.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	5.128.000,00
01.02.08	Alat Laboratorium	11	207.925.250,00
01.02.10	Komputer	97	602.357.476,00
01.02.17	Peralatan Proses/Produksi	1	9.000.000,00

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Nilai Aset (Rp)*
01.02.18	Rambu – Rambu	1	124.371.000,00
01.02.19	Peralatan Olahraga	1	5.000.000,00
01.03	Gedung dan Bangunan	76	32.964.284.112,00
01.03.01	Bangunan Gedung	76	32.964.284.112,00
01.04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	20	35.772.786.578,00
01.04.02	Bangunan Air	18	35.530.016.578,00
01.04.04	Jaringan	2	242.770.000,00
01.05	Aset Tetap Lainnya	25	60.235.439,00
01.05.01	Bahan Perpustakaan	5	4.611.500,00
01.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2	6.200.000,00
01.05.04	Biota Perairan	18	49.423.939,00
2	Aset Lainnya	1	247.867.000,00
02.04	Aset Lain-Lain	1	247.867.000,00
02.04.01	Aset Lain-Lain	1	247.867.000,00
Jumlah			89.121.249.902,00

Sumber: Data Neraca Dinlutkan 31 Desember 2024

Aset tetap terdiri dari tanah 16 bidang, peralatan dan mesin 461 unit, gedung dan bangunan 76 unit, jaringan 20 unit, aset tetap lainnya 25 unit,, serta aset lainnya 1 unit. Aset sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik bahkan rusak berat karena usia aset dan minimnya dana perawatan rutin. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang rapat, ruang kantor dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia sebagaia dalam kondisi kurang baik dan dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Kondisi ini terjadi karena banyaknya personal computer/laptop berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Tabel I. 3
Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	1		PENDAPATAN DAERAH			
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp12.630.000.000	Rp12.630.000.000	Rp0
			BELANJA DAERAH	Rp12.291.064.000	Rp11.865.406.130	-Rp425.657.870
5	1		BELANJA OPERASI	Rp12.067.064.000	Rp11.633.406.130	-Rp433.657.870
5	1	01	Belanja Pegawai	3.935.519.000	3.770.828.830	-Rp164.690.170
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.931.545.000	5.162.577.300	Rp1.231.032.300
5	1	05	Belanja Hibah	4.200.000.000	2.700.000.000	-Rp1.500.000.000
5	2		BELANJA MODAL	Rp224.000.000	Rp232.000.000	Rp8.000.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp5.000.000	Rp13.000.000	Rp8.000.000

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219000000	Rp219.000.000	Rp0
Jumlah Belanja				Rp12.291.064.000	Rp11.865.406.130	-Rp425.657.870
Total Surplus/(Defisit)				Rp338.936.000	Rp764.593.870	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinlutkan Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari APBD Kabupaten Rembang. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 Anggaran Dinlutkan semula Rp.12.291.064.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.11.865.406.130,- atau berkurang Rp.425.657.870,-. Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel I. 4
Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	2	3
I	PERENCANAAN KINERJA	
1	Melakukan evaluasi secara rutin mengenai kemajuan capaian kinerja secara lebih mendalam serta memetakan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja sehingga potensi kegagalan pencapaian kinerja dapat diantisipasi lebih dini	Evaluasi Rutin minimal setiap triwulan untuk mengevaluasi ketercapaian kinerja dan memetakan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target kinerja serta melakukan pengendalian intern untuk mengatasi kegagalan
2	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang lebih realistis dan menantang dalam mewujudkan hasil yang lebih baik	Membuat target yang realistis untuk penyusunan renstra mendatang
3	Melakukan tanda tangan dan stempel oleh pejabat yang berwenang di dokumen renstra	Dokumen renstra yang asli telah bertanda tangan dan berstempel selanjutnya melakukan scan dokumen dan melakukan pengunggahan di google drive
4	Melakukan perbaikan di dokumen renja BAB I Landasan Hukum poin 11 (sebelas) tentang SOTK Dinas Kelautan dan Perikanan	Telah dilakukan perbaikan di dokumen renja BAB I Landasan Hukum poin 11 (sebelas) tentang SOTK Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Melakukan unggahan perjanjian kinerja seluruh PNS dan PPPK yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan	Telah mengunggah perjanjian kinerja seluruh PNS dan PPPK yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Melakukan penandatanganan dokumen DPA (induk dan perubahan) oleh pejabat yang berwenang dan distempel	Dokumen DPA (induk dan perubahan) telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel selanjutnya dilakukan pengunggahan ke google drive
7	Melakukan unggahan file yang dibutuhkan di website Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai link yang sudah disediakan	Telah melakukan unggahan file yang dibutuhkan di website Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai link yang sudah disediakan
8	Melengkapi notulen dalam setiap laporan monitoring secara berkala	Telah dibuat notulen dalam setiap laporan monitoring

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	2	3
II	PENGUKURAN KINERJA	
1	Melaksanakan pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan teknologi informasi (aplikasi e-monev)	Menindaklanjuti pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan teknologi informasi (aplikasi e-monev), pada tahun 2024 capaian kinerja telah diunggah ke aplikasi sapakerja
2	Melengkapi dokumentasi rapat dengan tanda tangan dan daftar hadir	Menyusun dokumentasi rapat yang lengkap dengan tanda tangan dan daftar hadir sebagai lampirannya
3	Melengkapi kegiatan rapat triwulan IV, yang melibatkan seluruh pejabat administrator selaku PPTK	Menyusun laporan kegiatan rapat triwulan II, yang melibatkan seluruh pejabat administrator selaku PPTK dilengkapi dengan dokumentasi
4	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Menyusun Profil Indikator Kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan
III	PELAPORAN KINERJA	
1	Melampirkan bukti pengiriman dokumen LKjIP OPD kepada Kepala Daerah secara tepat waktu;	Melampirkan surat pengantar dokumen LKjIP OPD kepada Kepala Daerah
2	Menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional	Menyusun analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional dan melampirkan ke dalam LKjIP
IV	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil Penilaian Mandiri implementasi SAKIP	Menyusun Rencana Aksi tindaklanjut rekomendasi atas hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP dan melampirkan ke dalam LKjIP

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

- 6. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 7. Strategi dan Arah Kebijakan
- 8. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 10. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tahun 2024 terjadi pergeseran sebanyak 8 kali. Pergeseran dilakukan untuk mengakomodir penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan kondisi keuangan daerah guna ketercapaian kinerja daerah, perubahan anggaran tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Dinlutkan yang merupakan penjabaran operasional RPD Tahun 2021 - 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinlutkan Rembang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinlutkan selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya Produksi Perikanan”

Adapun sasaran Dinlutkan dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinlutkan Rembang, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	-2,07	1	1	1	1	1	1

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2

Strategi dan Arah Kebijakan

No	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Produksi perikanan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	1	Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, melalui:
			a	pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
			b	pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
			c	pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
			d	Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi database
			2	Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar daerah dan lintas sektoral
		2. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapam teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	3	Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
			a	Peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
			b	Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut dan tawar
			c	pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal
			d	peningkatan sarana dan prasarana perbenihan
			e	penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
			f	Pengembangan kawasan budidaya
			4	Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui:
			a	pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk unggul dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
		3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	5	Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
			a	pemenuhan kebutuhan bahan baku;
			b	peningkatan konsumsi ikan
			c	peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien
			d	pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Seritikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikanyang Baik / GMP (<i>Good Manufacturing Practices</i>) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (<i>Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP)</i>)

No	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		4. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi	6	Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinlutkan Rembang tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3
Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum	Setelah Perubahan	Bertambah/
		Perubahan (Rp)	(Rp)	Berkurang (Rp)
Meningkatnya Produksi perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.291.064.000	11.865.406.130	-425.657.870
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.843.464.000	7.920.697.830	1.077.233.830
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	5.680.000	-4.320.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	5.680.000	-4.320.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.933.299.000	3.764.828.830	-168.470.170
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.859.619.000	3.639.878.830	-219.740.170
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.680.000	124.950.000	51.270.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	3.780.000	3.780.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	3.780.000	3.780.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.610.000	125.110.000	1.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	11.500.000	1.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	11.000.000	11.000.000	0
	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	10.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.610.000	52.610.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.698.218.000	3.947.002.000	1.248.784.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000	6.700.000	2.300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.020.000	115.260.000	240.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum	Setelah Perubahan	Bertambah/
		Perubahan (Rp)	(Rp)	Berkurang (Rp)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.578.798.000	3.825.042.000	1.246.244.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.337.000	74.297.000	-4.040.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.837.000	50.289.000	-548.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	12.500.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	11.508.000	-3.492.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.722.600.000	3.579.708.300	-1.142.891.700
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.615.000.000	2.475.000.000	-1.140.000.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	355.000.000	100.000.000	-255.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.260.000.000	2.375.000.000	-885.000.000
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	187.600.000	187.065.300	-534.700
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	145.000.000	142.581.000	-2.419.000
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	42.600.000	44.484.300	1.884.300
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	920.000.000	917.643.000	-2.357.000
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	920.000.000	917.643.000	-2.357.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	175.000.000	75.000.000	-100.000.000
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	25.000.000	25.000.000	0
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25.000.000	25.000.000	0
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	150.000.000	50.000.000	-100.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	30.000.000	-100.000.000
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	0
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	550.000.000	290.000.000	-260.000.000
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	70.000.000	70.000.000	0
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	0
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.000.000	25.000.000	0
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.000.000	25.000.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum	Setelah Perubahan	Bertambah/
		Perubahan (Rp)	(Rp)	Berkurang (Rp)
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	455.000.000	195.000.000	-260.000.000
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	455.000.000	195.000.000	-260.000.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Dinlutkan Rembang Tahun 2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinlutkan Rembang yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Rembang sebagai berikut:

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinlutkan Rembang
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1	Triwulan I	-3,25
					Triwulan II	-3
					Triwulan III	0,4
					Triwulan IV	1

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.843.464.000
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	4.722.600.000
3	Program pengelolaan perikanan budidaya	175.000.000
4	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	550.000.000

Pada tahun 2024, Dinlutkan Rembang melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reuiu dilakukan karena adanya pergeseran anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Reuiu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinlutkan Rembang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1	Triwulan I	-3,25
					Triwulan II	-3
					Triwulan III	0,4
					Triwulan IV	1

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.920.697.830
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.579.708.300
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	75.000.000
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	290.000.000

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan mulai running aplikasi SIPARI Sistem Informasi Perikanan yang berfungsi untuk pemberian rekomendasi BBM; pendataan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan website, media sosial FB dan instagram untuk media keterbukaan informasi publik, juga berfungsi sebagai wahana menampung aspirasi masyarakat.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

erisi :
Capaian Kinerja Tahun 2024
Capaian Kinerja Lainnya
Efisiensi Anggaran
Inovasi
Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinlutkan Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang dengan Bupati Rembang.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2

Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPD
							TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	-2,07	-4,97	-3,49	1	-9,28	928		1

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan

Kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel III. 3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	Rata-rata persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan perikanan

Sumber data capaian sasaran diolah dari capaian kinerja program Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Jumlah indikator sasaran perangkat daerah tahun 2024 sejumlah 3 indikator. Dari jumlah total 3 indikator tersebut semuanya mengalami penurunan, rincian capaian kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4
Pengukuran Capaian Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Capaian	Target	Realisasi	Kinerja	Capaian Kinerja
			2023	2024	2024	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-6
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Dan Garam	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	6.557.774	6.639.746	6.583.744	0,40	40%
2	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	79.808.529	11.633.406.130	76.689.896	-3,91	-391%
3	Meningkatkan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	131.213.740	132.853.911	99.272.598	-24,34	-243,4%
CAPAIAN						-9,28	-928%

Kinerja sasaran Pertumbuhan produksi perikanan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%) target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Meta Indikator: Rata-rata persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan perikanan	-3,49	1%	-9,28	-928	1%	-928

Analisis tidak tercapainya Sasaran Pertumbuhan produksi perikanan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh berkurangnya aktivitas penangkapan ikan di laut karena adanya kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang hal ini menjadikan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Adanya dampak turunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan karena adanya pembatasan kuota BBM bersubsidi sehingga nelayan mengurangi intensitas melaut.
- b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur memaksa pemilik kapal untuk melaksanakan penangkapan sesuai dengan jalur dan sesuai dengan kuota yang telah diberikan sehingga menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut.
- c. Terbitnya peraturan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan yang menyebutkan adanya pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut pasca produksi membuat banyak pelaku usaha perikanan menghentikan sementara kegiatan produksinya karena menganggap pemungutan PNBP tersebut membebani mereka karena besarnya nilai presentase pungutan.
- d. Terbitnya Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 140 tahun 2023 tentang harga acuan ikan yang secara umum terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi harga asli di lapangan menyebabkan besarnya pungutan PNBP Pasca Produksi perikanan, karena pungutan PNBP Pasca Produksi tersebut didasarkan atas hasil tangkapan dan menggunakan acuan harga patokan yang ditetapkan oleh kementerian kelautan dan perikanan.
- e. Pengaruh adanya krisis global menyebabkan penurunan permintaan ekspor hasil pengolahan perikanan dan ikan segar

sehingga menyebabkan penurunan permintaan bahan baku industri pengolahan perikanan serta penurunan ekspor ikan segar ke luar negeri. Penurunan permintaan ekspor tersebut menyebabkan harga ikan di pasaran menurun secara drastis, tidak terserapnya hasil tangkapan tersebut bersamaan dengan bertiupnya angin muson timur (musim timuran) dimana kondisi perairan stabil dan melimpahnya hasil tangkapan semakin menurunkan nilai jual hasil tangkapan. Tidak terserapnya hasil tangkapan nelayan berlangsung sejak akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024

- f. Kondisi overfishing dan degradasi lingkungan di perairan laut Jawa menyebabkan produksi perikanan tangkap secara umum menurun.
- g. Budidaya perikanan mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,40%, setelah adanya Wabah Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) yang menyerang pada tahun 2023, sering dikaitkan atau disamakan juga dengan Early Mortality Syndrome (EMS). Udang mengalami kematian pada H+10 setelah tebar benih, menyebabkan pembudidaya di Kabupaten Rembang banyak yang menghentikan produksinya selama hampir 1 tahun mulai pertengahan tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024. Produksi budidaya setengah tahun terakhir mampu meningkatkan produksi sebesar 0,40%.
- h. Produksi perikanan budidaya belum bisa maksimal disebabkan efek Fenomena El Nino yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrem di Indonesia menyebabkan penurunan nilai produksi budidaya perikanan di tahun 2024. Selain fenomena El Nino pengaruh tingginya biaya produksi karena naiknya harga pakan menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pembudidaya. Faktor krisis global juga menurunkan nilai jual udang ekspor sehingga banyak pembudidaya menutup usahanya.

Upaya untuk mendukung capaian Sasaran, dengan Indikator Persentase Produksi Perikanan tersebut didukung oleh dengan 3 program teknis dan 1 program pendukung, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 6
 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja 5/4*100
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					#DIV/0!
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					#DIV/0!
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					#DIV/0!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD DINLUTKAN	Angka	70,50	72,66	103
	Nilai IKM OPD DINLUTKAN	Angka	76	76,8	101
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	100	118
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	4,00	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	85	100	118
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37,00	37,00	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	12,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2,00	2,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16,00	16,00	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	85	100	118
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2,00	2,00	100

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja 5/4*100
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	85	100	118
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	37,00	37,00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	%	90	100	111
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	12,00	100
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5,00	5,00	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah	%	90	100	111
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	12,00	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondidi Baik	%	85	100	118

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja 5/4*100
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	69,00	69,00	100
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20,00	20,00	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20,00	20,00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	2,00	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap	%	0,50	-3,91	-782
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	% Sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	%	25	25	100
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	3,00	3,00	100
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	2	2	100
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	25,00	39,00	156
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan	%	3	5,10	170
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	125,00	70,00	56
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	25,00	39,00	156
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	21,00	39,00	186
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kenaikan Nilai raman (Rp)	Rp	##### #	##### #	- 3.992
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	0,00		#DIV/0!
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	3,00	3,00	100

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja 5/4*100
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	%	1,25	0,40	32,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	% Kenaikan Kelas Pokdakan, Kugar	%	3	3,45	115
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	2,00	3,00	150
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	3,00	3,00	100
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	2,00	3,00	150
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	6,00	8,00	133
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% prasarana pembudidayaan ikan dan garam dalam kondisi baik	%	80	80	100
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	3,00	100
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10,00	20,00	200
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	5,00	4,00	80
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	%	1,25	-24,34	- 1.947
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Cakupan Data Pengolahan Perikanan	%	80	80	100
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	3,00	3	100
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk pengolahan perikanan yang bersertifikat	Unit	5	6	120

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja 5/4*100
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	20,00	90,00	450
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/ tahun	42,97		-
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	138.000		-
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	20,00	90,00	450

Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 melaksanakan 4 program dengan 5 indikator. Dari 5 indikator tersebut sebanyak 3 indikator masih berada dibawah target dan 2 indikator mencapai target, secara lengkap dapat disampaikan analisa capaian indikator program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

Program Pengelolaan Perikanan tangkap dengan indikator presentase produksi perikanan tangkap target 0,5% dengan realisasi -3,91% dengan capaian kinerja sebesar -391 %. Pada Tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar 76.689.896 ton dan menurun sebesar 3.118.633 ton dari sebelumnya sebesar 79.808.441 ton. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan mengharuskan kapal penangkap ikan yang semua menggunakan jaring cantrang dialihkan menjadi jaring tarik berkantong, sehingga harus merubah surat perijinan dan jenis alat

tangkap. Proses penerbitan izin dan penggantian alat tangkap tersebut sempat memakan waktu cukup lama. Dalam kurun waktu tersebut kapal dengan alat tangkap cantrang tidak beroperasi melakukan penangkapan, sehingga sangat berdampak terhadap menurunnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang.

- b. Selain karena hal tersebut diatas, menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh berkurangnya aktivitas penangkapan ikan di laut karena adanya kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang hal ini menjadikan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Adanya dampak turunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan karena adanya kenaikan harga BBM. Dampak yang paling dirasakan oleh pelaku usaha perikanan tangkap seperti nelayan dan pemasar produk perikanan tangkap yaitu harga ikan yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin tinggi, hasil perikanan tangkap yang sulit untuk dijual karena terbatasnya akses transportasi. Menyikapi hal ini telah dilakukan pemberian bantuan sosial penanganan dampak kenaikan harga BBM kepada nelayan agar tetap dapat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan,
- c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur memaksa pemilik kapal untuk melaksanakan penangkapan sesuai dengan jalur dan sesuai dengan kuota yang telah diberikan sehingga menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut.
- d. Terbitnya peraturan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan yang menyebutkan adanya pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut pasca produksi membuat banyak pelaku usaha perikanan menghentikan sementara kegiatan produksinya karena menganggap pemungutan PNBPNP tersebut

- membebani mereka karena besarnya nilai presentase pungutan.
- e. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan nomor 140 tahun 2023 tentang harga acuan ikan yang secara umum terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi harga asli di lapangan menyebabkan besarnya pungutan PNBP Pasca Produksi perikanan, karena pungutan PNBP Pasca Produksi tersebut didasarkan atas hasil tangkapan dan menggunakan acuan harga patokan yang ditetapkan oleh KKP.
 - f. Pengaruh adanya krisis global menyebabkan penurunan permintaan ekspor hasil pengolahan perikanan dan ikan segar sehingga menyebabkan penurunan permintaan bahan baku industri pengolahan perikanan serta penurunan ekspor ikan segar ke luar negeri. Penurunan permintaan ekspor tersebut menyebabkan harga ikan di pasaran menurun secara drastis, kondisi tidak terserapnya hasil tangkapan tersebut bersamaan dengan bertiupnya angin muson timur (musim timuran) dimana kondisi perairan stabil dan melimpahnya hasil tangkapan semakin menurunkan nilai jual hasil tangkapan.
 - g. Kondisi overfishing dan degradasi lingkungan di perairan laut Jawa menyebabkan produksi perikanan tangkap secara umum menurun.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator presentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target 1,25% terealisasi 0,40% dengan capaian kinerja sebesar 32%. Pada tahun 2023 produksi budidaya sebesar 6.557.774 kg naik sebesar 25.970 kg menjadi 6.583.744 kg.

Kurang maksimalnya produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 disebabkan beberapa hal antara lain Fenomena El Nino yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrem di Indonesia menyebabkan penurunan nilai produksi budidaya perikanan di tahun 2024. Selain fenomena El Nino pengaruh tingginya biaya produksi karena naiknya harga pakan menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pembudidaya. Faktor krisis global juga menurunkan nilai jual udang ekspor sehingga banyak pembudidaya menutup usahanya.

Sektor budidaya perikanan mulai periode semester 1 tahun 2024 masih terpengaruh wabah penyakit terutama budidaya udang vanamei. Wabah yang menyerang pada tahun 2023 adalah Acute

Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), sering dikaitkan atau disamakan juga dengan *Early Mortality Syndrome* (EMS). Udang mengalami kematian pada H+10 setelah tebar benih, menyebabkan pembudidaya di Kabupaten Rembang banyak yang menghentikan produksinya selama hampir 1 tahun sejak pertengahan 2023 sampai dengan semester 1 tahun 2024.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan indikator persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan target 1,25% menurun sebesar -24,34%. Produksi Olahan Hasil Perikanan Pada Tahun 2024 sebesar 99.272.598 menurun sebesar 31.941.141,5 kg dari tahun 2023 yang jumlahnya sebesar 131.213.739,5 kg Realisasi -19,63% dengan capaian kinerja sebesar -1.963%.

Kinerja program belum tercapai dikarenakan krisis global secara umum menyebabkan banyak perusahaan pengolahan hasil perikanan gulung tikar. Ada beberapa perusahaan pengolahan di Kabupaten Rembang sudah tidak mampu lagi memproduksi pasca pandemi COVID 19. Tutupnya perusahaan pengolahan di kabupaten rembang berdampak besar terhadap penurunan produksi pengolahan hasil perikanan. Menurunnya permintaan pasar internasional juga menyebabkan penurunan harga ikan hasil tangkapan karena banyak perusahaan tidak mampu memasarkan hasil produksinya sehingga hasil tangkapan hanya menumpuk di cold storage.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan IKM dengan target 76,5 dan Nilai SAKIP OPD dengan target sebesar 72 tercapai sebesar 72,66.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda Rembang dan Program Pemda Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinlutkan memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 7
Kontribusi Sasaran Dinlutkan terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkat kan Pertumbuh an Sektor Unggulan Dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,3	0,02	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan (%)	1%	-9,28%

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan sebesar -0,03. Perhitungan kontribusi PDRB di dapatkan dari data rilis BPS.

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1	-9,28	-928	11.865.406.130	11.326.057.971	95,45	-

Sumber: Laporan Keuangan Dinlutkan Th 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan yang besar sampai dengan -928% sedangkan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.11.865.406.130,- terealisasi Rp.11.326.057.971,- atau 95,45% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja **tidak efisien**.

Dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.865.286.252.372,- digunakan untuk membiayai 4 Program dan 14 Kegiatan dan 28 Subkegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebesar 95,45% atau terealisasi sebesar Rp. 11.326.057.971,-.

Anggaran belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp. 11.633.406.130,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.326.057.971,-. Prosentase realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 95,55 %. Anggaran belanja modal sebesar Rp. 232.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.115.783.971,-

Dari 4 program yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang capaian realisasi anggaran sebesar 95,45%. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 3.579.708.300,- realisasi sebesar 3.209.669.000,- atau 89,66%. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.604.598,- atau sebesar 91,47%. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 287.167.700,- atau 99,02%.

3.4. Inovasi

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Berbagai tantangan dan permasalahan penyebab penurunan produksis perikanan tersebut diatas telah diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain;
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan kecil, pembudidaya skala mikro dan kecil, serta pengolah dan pemasar skala mikro dan kecil;
3. Untuk memfasilitasi masyarakat akan mahalnnya harga BBM telah ditanggapi oleh dinas kelautan dan perikanan dengan adanya pelayanan pemberian rekomendasi BBM bersubsidi untuk pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Pelayanan pemberian rekomendasi BBM bersubsidi tersebut dilakukan setiap hari kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar melalui kegiatan pembinaan rutin sinergi dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan rutin

kepada pelaku utama kelautan dan perikanan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan usahanya;

6. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan dan pemantauan kesehatan lingkungan dan benih budidaya untuk mencegah penyakit ikan dan kegagalan budidaya bersinergi dengan BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan) Semarang serta Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL) dan dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;
7. Melakukan fasilitasi untuk memperoleh akses sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) untuk pembudidaya ikan sehingga bisa meminimalisir kegagalan budidaya;
8. Pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Seritikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikanyang Baik / GMP (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP));
9. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam;

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan beberapa kerjasama lintas sektoral antara lain:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan terhadap akses permodalan bersinergi dengan pendamping LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan dan pemantauan kesehatan lingkungan dan benih budidaya untuk mencegah penyakit ikan dan kegagalan budidaya bersinergi dengan BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan) Semarang serta Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL) dan dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;

3. Melakukan fasilitasi untuk memperoleh akses sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) untuk pembudidaya ikan sehingga bisa meminimalisir kegagalan budidaya.
4. Pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Seritikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikanyang Baik / GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP)*);

Tabel III. 9
Inventarisasi Lintas Sektor Dinlutkan Rembang

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan	LPMUKP				
2.	Kegiatan Pembinaan Pelaku Utama	BRSDMKP / KKP				
3.	Kegiatan Pemberian Asuransi Nelayan	DKP Provinsi				
4.	Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan) Semarang serta Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL) dan dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara				
5	Kegiatan Audiensi dan Koordinasi	DPRD, KKP, Perusahaan Perikanan				

IV. Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatnya produksi perikanan sebesar 1%. Sasaran strategis tersebut tidak tercapai dengan penurunan sebesar -9,28%.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:
 - a. Menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh berkurangnya aktivitas penangkapan ikan di laut karena adanya kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang hal ini menjadikan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Adanya dampak turunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan karena adanya pembatasan kuota BBM bersubsidi sehingga nelayan mengurangi intensitas melaut.
 - b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur memaksa pemilik kapal untuk melaksanakan penangkapan sesuai dengan jalur dan sesuai dengan kuota yang telah diberikan sehingga menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut.

- c. Terbitnya peraturan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan yang menyebutkan adanya pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut pasca produksi membuat banyak pelaku usaha perikanan menghentikan sementara kegiatan produksinya karena menganggap pemungutan PNBP tersebut membebani mereka karena besarnya nilai presentase pungutan.
- d. Terbitnya Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 140 tahun 2023 tentang harga acuan ikan yang secara umum terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi harga asli di lapangan menyebabkan besarnya pungutan PNBP Pasca Produksi perikanan, karena pungutan PNBP Pasca Produksi tersebut didasarkan atas hasil tangkapan dan menggunakan acuan harga patokan yang ditetapkan oleh kementerian kelautan dan perikanan.
- e. Pengaruh adanya krisis global menyebabkan penurunan permintaan ekspor hasil pengolahan perikanan dan ikan segar sehingga menyebabkan penurunan permintaan bahan baku industri pengolahan perikanan serta penurunan ekspor ikan segar ke luar negeri. Penurunan permintaan ekspor tersebut menyebabkan harga ikan di pasaran menurun secara drastis, tidak terserapnya hasil tangkapan tersebut bersamaan dengan bertiupnya angin muson timur (musim timuran) dimana kondisi perairan stabil dan melimpahnya hasil tangkapan semakin menurunkan nilai jual hasil tangkapan. Tidak terserapnya hasil tangkapan nelayan berlangsung sejak akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024
- f. Kondisi overfishing dan degradasi lingkungan di perairan laut jawa menyebabkan produksi perikanan tangkap secara umum menurun.

- g. Budidaya perikanan mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,40%, setelah adanya Wabah Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) yang menyerang pada tahun 2023, sering dikaitkan atau disamakan juga dengan Early Mortality Syndrome (EMS). Udang mengalami kematian pada H+10 setelah tebar benih, menyebabkan pembudidaya di Kabupaten Rembang banyak yang menghentikan produksinya selama hampir 1 tahun mulai pertengahan tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024. Produksi budidaya setengah tahun terakhir mampu meningkatkan produksi sebesar 0,40%.
- h. Produksi perikanan budidaya belum bisa maksimal disebabkan efek Fenomena El Nino yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrem di Indonesia menyebabkan penurunan nilai produksi budidaya perikanan di tahun 2024. Selain fenomena El Nino pengaruh tingginya biaya produksi karena naiknya harga pakan menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pembudidaya. Faktor krisis global juga menurunkan nilai jual udang ekspor sehingga banyak pembudidaya menutup usahanya.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada tahun 2024 telah memberikan arah bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja 2024, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya sebagai berikut :

1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
3. Pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
4. Pengembangan kartu KUSUKA yang terintegrasi dengan sistem database;

5. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui Peningkatan peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar daerah dan antar sektoral;
6. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB);
7. Intensifikasi budidaya ikan air payau dan tawar;
8. Pengembangan kawasan budidaya vanamei;
9. pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif;
10. Pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Seritikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikanyang Baik / GMP (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP);
11. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam;

Lampiran 1.
Perencanaan Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	Target tahunan				Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4		5	6	7	8	10
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	-2,07	1	1	1	1	1